

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN SEKTOR DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA TAHUN 2011-2015

Ikrar Mallarangang

Universitas Muslim Indonesia Makassar
Email: *Ikrarmalarangang@gmail.com*

ABSTRACT

The aims of this research are (1) to find out the level of imbalance of agriculture sector in South Celebes province in 2011-2015. (2) to know the level of imbalance of industrial sector in South Celebes province in 2011-2015 and (3) to know the level of imbalance of other service sector in south sulawesi province in 2011-2015. The technique used to obtain the required data in this research is the documentation technique.

To achieve the objectives and answer the problems that have been set, then used two kinds of data analysis methods, namely williamson index analysis, and theil index. the results show that: (1) based on williamson index analysis, the level of inequality that occurs is above zero, indicating inequality that occurred in South Celebes province during the period of 2011-2015 has increased, (2) based on the theil index analysis showed that there has been a very high inequality in South Celebes The theil index value during the period 2011-2015 shown an imbalance for the industrial sector, which is much higher than the agricultural sector, forestry and fisheries with other services, and this should be immediately addressed by the government.

Keywords: *development imbalance, economic sector, williamson index, theil index.*

PENDAHULUAN

Sejauh ini pembangunan yang dilaksanakan cukup mampu mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, akan tetapi dalam banyak kasus di Negara

berkembang relatif tidak menghilangkan ketimpangan dalam pembangunan (disparity). Ketimpangan pembangunan umumnya terjadi pada aspek pendapatan, spasial dan sektoral. Petunjuk

Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor.....Ikrar Mallarangang

awalnya adalah adanya perbedaan (gap) antara orang kaya dan miskin, ketimpangan spasial yang menyebabkan adanya wilayah maju (developed region) dan wilayah tertinggal (underdeveloped region) serta ketimpangan sektoral yang menciptakan sektor unggulan dan non unggulan. Persoalan ketimpangan juga mewarnai proses pembangunan di Indonesia melalui perbandingan kawasan (region) Barat dan Timur, Jawa dan luar Jawa serta antar wilayah Provinsi dan Kabupaten kota sebagai daerah otonom.

Indonesia sebagai sebuah Negara kepulauan yang terdiri dari banyak wilayah daratan dan wilayah kepulauan, mengharuskan perlunya penerapan sistem pemerintahan yang paling cocok dengan karakter tersebut. Sistem desentralisasi dianggap sebagai sistem yang paling memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia karena akan melahirkan bentuk-bentuk pemerintahan yang baru yang berada pada level wilayah yang lebih rendah, dimana berbagai urusan dan tanggung jawab daerah dapat dikelola dengan fokus dan sesuai potensi masing-masing daerah.

Terkait alasan mengapa desentralisasi dipilih untuk menjadi sistem pemerintahan Negara, Syarif (2000) dalam Syafrizal (2008, hal 230) menyebutkan bahwa terdapat

setidaknya tiga alasan pokok mengapa desentralisasi diperlukan, *pertama* adalah political equality, *kedua* adalah local accountability, dan *ketiga* adalah local responsiveness. *Political equality* terkait dengan alasan otonomi daerah. Adapun alasan *local accountability* adalah terkait dengan peningkatan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. *Ketiga local responsiveness* adalah alasan yang terkait dengan peningkatan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masalah-masalah social ekonomi yang terjadi di daerahnya. *Ketiga* unsur ini merupakan unsur yang sangat penting bagi upaya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan sosial di daerah.

Dengan adanya desentralisasi ini diharapkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat meningkat dan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah tidak terlalu jauh karena daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembangun dengan memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing dalam rangka mendukung rencana pembangunan nasional. Untuk melancarkan program pembangunan di daerah dibutuhkan strategi yang tepat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor.....Ikrar Mallarangang

masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2010 – 2014

Pertumbuhan					
Provinsi	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
<i>Sulawesi Selatan</i>	8.63	8.13	8.87	7.63	7.57

Sumber Data : BPS Sulawesi Selatan Tahun 2015

Capello (2007) dalam Haryanto (2010), menyebutkan bahwa analisis pembangunan wilayah mensyaratkan dua hal, yaitu pertumbuhan absolut yang menunjukkan kemampuan sumber daya yang potensial di wilayah tersebut dan pertumbuhan relatif antar wilayah yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan ketimpangan regional dan kemungkinan dari konvergensi pada tingkat pertumbuhannya atau pendapatan rata-ratanya.

Pemerintah berperan cukup besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena pemerintah merupakan penggerak utama pembangunan. Anggaran pembiayaan pembangunan menjadi pedoman dalam membiayai tugas negara berasal dari berbagai sumber pendapatan baik dalam maupun luar negeri dan dapat dipergunakan sebagai

alat kebijaksanaan ekonomi. Oleh sebab itu, anggaran negara harus sesuai prinsip dengan kondisi dan keadaan ekonomi. Dan anggaran negara dapat dipergunakan sebagai alat kebijaksanaan fiskal dalam mempengaruhi pendapatan nasional, karena dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah baik secara jumlah maupun proporsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan peningkatan aktivitas pemerintah yang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dalam masyarakat.

Provinsi Sulawesi Selatan berperan penting sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia, dampak positif diberlakukannya desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada perkembangan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Tabel 2
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2011 – 2015

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,325.6	44,263.5	46,446.7	51,081.1	53,957.3
2	Pertambangan dan Penggalian	11,896.7	12,529.9	13,241.1	14,712.0	15,867.2
3	Industri Pengolahan	25,736.6	27,966.1	30,545.3	33,276.2	35,506.0
4	Pengadaan Listrik dan Gas	159.1	184.9	199.8	223.1	214.2
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang	270.6	280.1	295.6	301.8	302.9
6	Konstruksi	21,429.6	23,541.8	26,029.5	27,666.6	29,967.3
7	Perdagangan Besar dan Eceran	25,169.5	28,154.9	30,189.9	32,363.4	34,915.4
8	Transportasi dan Pergudangan	7,005.9	7,948.0	8,453.8	8,595.7	9,189.3
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2,483.8	2,767.0	2,954.0	3,183.4	3,365.2
10	Informasi dan komunikasi	10,008.1	12,069.6	13,768.4	14,560.1	15,712.6
11	Jasa keuangan dan asuransi	6,044.1	7,003.9	7,626.1	8,065.2	8,662.5
12	Real estate	6,587.1	7,278.9	7,932.6	8,564.5	9,179.4
13	Jasa perusahaan	811.3	876.4	937.4	1,000.8	1,059.5
14	Adm pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial	9,769.1	9,986.7	10,292.9	10,555.5	11,381.7
15	Jasa pendidikan	10,292.7	11,064.4	11,918.8	12,473.4	13,378.0
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	3,356.8	3,714.9	4,021.3	4,432.7	4,845.2
17	Jasa lainnya	2,362.0	2,553.6	2,736.0	2,943.2	3,207.8
PDRB		185,708.5	202,184.6	217,589.1	233,998.7	250,729.6

Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor.....Ikrar Mallarangang

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2016

Dari Tabel 2. di atas menunjukkan bahwa PDRB Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan dengan total PDRB dari tahun 2011 – 2015 Pada tahun 2011 Rp. 185,708.5, tahun 2012 Rp. 202,184.6 Tahun 2013 Rp. 217,589.1 Tahun 2014 Rp. 233,998.7 dan Tahun 2015 Rp. 250,729.6 Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Sulawesi Selatan secara keseluruhan mengalami peningkatan.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2011 – 2015
(ribu jiwa)

Provinsi	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Sulawesi Selatan	8.156,1	8.250,0	8.342,0	8.432,2	8.520,3

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2016

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan dengan total penduduk Pada tahun 2011 berjumlah 8.156,1 jiwa, tahun 2012 berjumlah 8.250,0 jiwa, Tahun 2013 berjumlah 8.342,0 jiwa, Tahun 2014 berjumlah 8.432,2 dan Tahun 2015 berjumlah 8.520,3 jiwa.

Berdasarkan latar belakang di atas, dimana Sulawesi Selatan Memiliki kondisi pertumbuhan Ekonomi yang cukup baik maka penulis mengangkat judul penelitian “Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011-2015”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pembangunan Ekonomi

Menurut Rostow Pembangunan merupakan proses multidimensional yang menyebabkan perubahan karakteristik penting suatu masyarakat, misalnya perubahan keadaan sitem politik, struktur social, sistem nilai dalam masyarakat dan struktur ekonominya. Rostow membedakan proses pembangunan menjadi lima tahapan yaitu: masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi (Arsyad, 199: 117)

Menurut Jhingan (2012) pembangunan ekonomi suatu Negara tergantung pada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, usaha,

teknologi sebagai factor ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, sikap budaya, nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang sebagai faktor non ekonomi.

Faktor ekonomi yang dimaksud yaitu:

1. Sumber Alam. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah, mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber laut. Namun kekayaan alam saja belum cukup dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang terpenting adalah pemanfaatannya secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga dapat lebih efisien;
2. Akumulasi Modal. Modal berarti persediaan factor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional;
3. Organisasi. Disamping perusahaan swasta, organisasi juga mencakup pemerintah, bank dan lembaga internasional yang ikut terlibat dalam penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi;

4. Kemajuan Teknologi. Perubahan teknologi berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atas inovasi baru sehingga mampu meningkatkan produktivitas buruh, modal, dan factor produksi lainnya;
5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi. Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas, sehingga membawa kearah ekonomi skala besar yang selanjutnya dapat membantu perkembangan industry.

Faktor nonekonomi juga memiliki arti yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Faktor Sosial. Jika perkembangan ekonomi ingin berjalan dengan baik, pandangan, nilai, dan lembaga social harus diubah. Perubahan hanya mungkin terjadi melalui penyebaran pendidikan dan ilmu pengetahuan. Masyarakat harus menyadari cita-cita dan tujuan hidup mereka sehingga orang harus memiliki kemampuan untuk meraihnya;
2. Faktor Manusia. Pertumbuhan Ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia namun tetapi lebih kepada efisiensi mereka, ini yang disebut pembentukan modal insane dimana proses

Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor.....Ikrar Mallarangang

ini mencakup kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial;

3. Faktor Politik dan Administrasi. Pemerintah harus dapat memberikan kondisi administrasi yang bersih dan situasi politik yang stabil, sehingga dapat merangsang dan mendorong kegiatan ekonomi.

Arsyad (1999) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Proses ini mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industry-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Defenisi mengenai teori pembangunan telah banyak dikemukakan oleh para ahli, namun belum ada satu teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi secara komprehensif, namun demikian

terdapat perbedaan teori yang secara parsial yang telah mengarahkan pada pemahaman mengenai arti penting suatu pembangunan ekonomi daerah.

1. Teori ekonomi Neo Klasik

Teori ini tidak memiliki dimensi spasial (ruang) yang signifikan, namun teori ekonomi klasik memberikan konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah, yakni keseimbangan dan mobilitas faktor produksi.

2. Teori Basis Ekonomi

Teori ini menyatakan bahwa penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Jika sumber daya lokal yakni tenaga kerja dan bahan baku untuk industry dipasok secara lokal, maka akan tercipta kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Namun model ini didasarkan pada permintaan eksternal dan bahan baku internal sehingga memiliki ketergantungan terhadap kekuatan pasar baik nasional maupun internasional

3. Teori Lokasi

Lokasi berperan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan daerah, karena perusahaan

Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor.....Ikrar Mallarangang

umumnya cenderung meminimumkan biaya dengan mencari lokasi yang terdekat dengan pasar. Variabel lain yang mempengaruhi kualitas suatu lokasi adalah upah tenaga kerja, biaya energy, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan, kualitas pemerintah daerah serta sanitasi. Meskipun demikian perkembangan teknologi dan komunikasi telah menjadikan teori ini kurang signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan daerah.

4. Teori Tempat Sentral

Hirarki tempat selalu dianggap keberadaannya oleh teori ini. Jika terdapat suatu tempat sentral, maka tempat sentral tersebut didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya berupa industri dan bahan baku. Dalam konteks masa kini teori tempat sentral dapat diibaratkan sebagai kota metropolitan dengan kota penyangganya.

5. Teori Kausasi Kumulatif

Konsep dasar dari teori ini adalah buruknya kondisi daerah disekitar kota. Hal ini didasarkan pada semakin menguatnya kekuatan pasar yang memperparah kesenjangan

antara kota dan daerah. Menurut Myrdal (dalam Arsyad, 2010:377) fenomena ini disebut dengan *backwash effects*, dimana daerah yang maju lebih unggul dibandingkan daerah yang terbelakang dan akan terus berlanjut.

6. Teori Daya Tarik Industri

Teori ini merupakan model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yang didasari oleh prinsip pemberian subsidi dan insentif. Masyarakat dianggap dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis jika masyarakatnya diberikan bantuan berupa subsidi dan insentif oleh pemerintah.

Rostow membedakan proses pembangunan ekonomi menjadi lima tahap yaitu:

1. Perekonomian Tradisional, pada tahap ini masyarakat tradisional cenderung bersifat subsisten, pemanfaatan teknologi dalam sistem produksi yang digunakan masih sangat terbatas.
2. Prakondisi Tinggal Landas, adalah transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Sektor industri mulai berkembang di samping sektor pertanian yang masih memegang peranan cukup signifikan bagi perekonomian. Pada tahap ini perekonomian mulai bergerak dinamis,

Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor.....Ikrar Mallarangang

industri-industri bermuculan, perkembangan teknologi yang pesat, dan lembaga keuangan resmi sebagai penggerak dana masyarakat mulai bermunculan, serta terjadi investasi besar-besaran terutama pada industri manufaktur.

3. **Tinggal Landas.** Tinggal landas merupakan tahap yang menentukan dalam keseluruhan proses pembangunan dalam keseluruhan proses pembangunan dalam keseluruhan pembangunan bagi kehidupan masyarakat. Tahap ini memiliki waktu yang cukup pendek. Dalam tahap ini akan terjadi suatu revolusi industri yang berhubungan erat dengan revolusi metode produksi
4. **Menuju Kedewasaan.** Tahapan ini merupakan tahapan jangka panjang dimana produksi dilakukan secara swadaya. Pada saat Negara mengalami tahapan ini, terhadap tiga perubahan penting yang terjadi. Pertama tenaga kerja berubah dari tidak terdidik, kedua perubahan watak pengusaha dari pekerja keras berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan. Ketiga masyarakat jenuh terhadap industrialisasi dan menginginkan perubahan lebih jauh.
5. **Tahap Kondisi Masa Tinggi.** Tahap ini adalah tahap yang

menentukan keseluruhan proses pembangunan bagi kehidupan masyarakat. Tahap ini berlaku pada masa yang relative pendek, kira-kira dua dasawarsa. Pada fase ini terjadi perubahan (*demand side*) dalam sistem produksi yang dianut. Sementara itu terjadi pula pergeseran ekonomi yang semula lebih banyak menitikberatkan pada sisi produksi kini beralih ke konsumsi.

Pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat dibidang ekonomi (Rahmat, 2013:1). Pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang sangat luas. Secara tradisional pembangunan dipandang sebagai suatu fenomena ekonomi yang diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Persepektif mengenai tujuan dan makna pembangunan kemudian berkembang menjadi lebih luas lagi. Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kehidupan yang serba lebih baik secara material

Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor.....Ikrar Mallarangang

maupun spiritual. Oleh karena itu, indikator pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDRB maupun PDRB perkapita, tetapi juga indikator lainnya seperti ketenagakerjaan, pendidikan, distribusi pendapatan, jumlah penduduk miskin. Hal ini sesuai dengan paradigma pembangunan modern yang mulai mengedepankan pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, serta penurunan tingkat pengangguran (Todaro dan Smith, 2006:103).

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2010:11).

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (1) Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara *continue*; (2) Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita; (3)

Peningkatan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang; dan (4) Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya).

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan. Menurut Jhingan (2012:338), salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal materil maupun modal manusia. Ada berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercapai.

Tujuan pokok pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk membangun peralatan modal dan alat-alat yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri (Jhingan, 2012:338).

Untuk dapat meningkatkan kemajuan perekonomian, suatu negara

Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor.....Ikrar Mallarangang

harus memenuhi persyaratan dasar dalam melakukan pembangunan. Prasyarat-prasyarat dasar bagi pembangunan ekonomi menurut M.L. Jhingan (2012:41) adalah:

1. Atas dasar kekuatan sendiri, hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materiil harus muncul dari warga negara itu sendiri.
2. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasarnya yang menyebabkan mobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektor dan pembangunan, sehingga diperlukan perbaikan dan penggantian lembaga sosial ekonomi.
3. Perubahan struktural, adanya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial, dan motivasi yang ada secara radikal.
4. Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan strategis dalam proses pembangunan. Namun penyediaan atau penciptaan modal akan menjadi sia-sia kalau tidak ada faktor lain yang menunjang pertumbuhan ekonomi.
5. Kriteria investasi yang tepat, merupakan tanggung jawab negara untuk melakukan

investasi yang paling menguntungkan masyarakat, harus dikaji dengan mempertimbangkan keseluruhan kompleks dinamika perekonomian.

6. Persyaratan sosial budaya, wawasan sosial budaya masyarakat haruslah diubah jika pembangunan diharapkan dapat berjalan. Kenaikan pendapatan nasional tidak akan membawa kenaikan kesejahteraan sosial, jika kenaikan pendapatan itu kurang dibarengi dengan penyesuaian budaya.
7. Administrasi, kehadiran administrasi yang kuat, berwibawa, dan tidak korup, merupakan *sine qua non* pembangunan ekonomi. Tanpa alat perlengkapan administratif yang baik dan efisien, rencana pembangunan publik maupun privat tidak akan dapat dilaksanakan secara sempurna.

Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi

Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor.....Ikrar Mallarangang

(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2005:108). Selanjutnya dikatakan pula bahwa tujuan utama dari setiap upaya pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.

Menurut Adisasmita (2008:13), pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan transformasi pengetahuan (Adisasmita, 2005:19). Karakteristik utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah penekanan pada pembangunan endogen yang menggunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam daerah untuk menciptakan

kesempatan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijaksanaan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan karakteristik daerah atau kearifan lokal yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada tumbuhnya inisiatif, inovatif dan kreativitas dari daerah dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan produktif (Munir, 2002:65).

Menurut pemikiran ekonomi klasik, pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumberdaya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan daerah yang miskin sumberdaya alam. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih bisa dibenarkan, dalam artian sumberdaya alam harus dilihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus terus dikembangkan. Untuk itu diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya yang sangat penting adalah teknologi dan sumberdaya manusia (Tambunan, 2001: 198).

Pada hakekatnya, inti dari pembahasan teori-teori tersebut

Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor.....Ikrar Mallarangang

berkisar pada dua hal, yaitu metode analisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu. Adapun beberapa teori pembangunan ekonomi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Ekonomi Neo Klasik

Teori ini dipelopori oleh George H. Bort tahun 1960 (Sjafrizal, 2008:95). Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh kemampuan wilayah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan wilayah ditentukan oleh potensi daerah bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah.

Model Neo-Klasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan wilayah cenderung melebar. Apabila proses pembangunan terus berlanjut, dan semakin

baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi, maka mobilitas modal dan tenaga kerja akan semakin lancar.

Teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah juga modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi ke daerah yang berupah rendah (Arsyad, 2010:376).

2. Teori Basis Ekonomi

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk kemudian diekspor, sehingga akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja baru (Arsyad, 2010:376).

Menurut Hover dalam Nikijuluw (2013), pertumbuhan beberapa sektor basis akan menentukan pembangunan daerah secara keseluruhan, sementara berkembangnya sektor nonbasis hanya

Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor.....Ikrar Mallarangang

merupakan konsekuensi-konsekuensi dari pembangunan daerah. Dalam teori basis ekonomi menganggap bahwa perekonomian regional dibagi menjadi dua sektor yaitu sektor basis dan sektor nonbasis.

Sektor basis merupakan sektor yang melakukan aktifitas berorientasi ekspor keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan, atau dengan kata lain sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan komparatif dan keuntungan kompetitif yang cukup tinggi. Sedangkan sektor nonbasis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan, ruang lingkup produksinya dan pemasarannya adalah bersifat lokal, hanya untuk mencukupi kebutuhan daerah tersebut tanpa melakukan ekspor.

Menurut Richardson dalam Adisasmita (2005:28), analisis basis ekonomi adalah berkenaan dengan identifikasi pendapatan basis. Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah yang bersangkutan, selanjutnya menambah permintaan terhadap barang dan jasa di

dalam wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis.

Dalam Sjafrizal (2008: 87), model basis mula-mula diperkenalkan oleh Douglas C. North. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh keuntungan komparatif yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Bila daerah yang bersangkutan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keuntungan komparatif sebagai basis untuk ekspor, maka pertumbuhan daerah yang bersangkutan akan ditingkatkan.

Strategi pembangunan daerah berdasarkan potensi ekonomi yang muncul berdasarkan teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (*aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut.

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah terdapat beberapa analisis yang digunakan, antara lain:

1. Metode Langsung

Metode langsung dapat digunakan dengan survei langsung kepada pelaku

usaha ke mana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan dari mana mereka membeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut. Dari jawaban yang diberikan, dapat ditentukan berapa persen produk yang dijual ke luar wilayah dan berapa persen yang dipasarkan di dalam wilayah. Hal yang sama juga dilakukan untuk bahan baku yang mereka gunakan. Untuk kepentingan analisis, perlu diketahui jumlah orang yang bekerja dan berapa nilai tambah yang diciptakan oleh kegiatan usaha tersebut.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi atau disebut metode asumsi. Dalam metode asumsi, berdasarkan kondisi wilayah tersebut (berdasarkan data sekunder), ada kegiatan tertentu yang diasumsikan sebagai kegiatan basis dan kegiatan lainnya sebagai kegiatan nonbasis. Kegiatan yang mayoritas produknya dijual ke luar wilayah atau mayoritas uang masuknya berasal dari luar wilayah langsung dianggap basis, sedangkan yang mayoritas produknya dipasarkan lokal dianggap nonbasis.

3. Metode Campuran

Suatu wilayah yang sudah berkembang, cukup banyak usaha yang tercampur antara kegiatan basis dan kegiatan nonbasis. Penggunaan metode asumsi murni akan memberikan kesalahan yang besar. Akan tetapi, penggunaan metode langsung yang murni juga cukup berat, yang sering dilakukan adalah gabungan antara metode asumsi dengan metode langsung yang disebut metode campuran. Dalam metode campuran diadakan survei pendahuluan, yaitu pengumpulan data sekunder, biasanya dari instansi pemerintah atau lembaga pengumpul data seperti BPS. Dari data sekunder berdasarkan analisis ditentukan kegiatan mana yang dianggap basis dan yang nonbasis. Asumsi apabila 70% atau lebih produknya diperkirakan dijual ke luar wilayah maka kegiatan itu langsung dianggap basis. Sebaliknya, apabila 70% atau lebih produknya dipasarkan di tingkat lokal maka langsung dianggap nonbasis. Untuk menentukan porsi tersebut, harus dilakukan survei dan harus ditentukan sektor mana yang surveinya cukup dengan pengumpulan data sekunder dan sektor mana yang mungkin

membutuhkan sampling pengumpulan data langsung dari pelaku usaha. Jadi, untuk suatu wilayah yang ekonominya terbuka dan kegiatannya cukup beragam, tidak mungkin hanya menggunakan metode asumsi saja tetapi haruslah gabungan antara metode asumsi dan metode langsung.

4. Metode *Location Quotients*

Metode *Location Quotients* merupakan suatu alat yang dapat digunakan dengan mudah, cepat, dan tepat. Karena kesederhanaannya, teknik *Location Quotient* dapat dihitung berulang kali dengan menggunakan berbagai perubahan acuan dan periode waktu. Analisis *Location Quotient* dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah.

5. Teori Lokasi

Teori ini dipelopori oleh Christaller tahun 1933. Teori ini lebih terkenal sebagai teori pertumbuhan perkotaan, dimana pertumbuhan kota tergantung spesialisasinya dalam fungsi pelayanan perkotaan, dan

tingkat permintaan terhadap pelayanan perkotaan oleh daerah sekitarnya akan menentukan kecepatan pertumbuhan kota (tempat pemusatan). Terdapat empat faktor yang menyebabkan timbulnya pusat-pusat pelayanan yaitu: (a) faktor lokasi ekonomi, (b) faktor ketersediaan sumberdaya, (c) kekuatan aglomerasi dan (d) faktor investasi pemerintah (Tarigan, 2005:162). Para ekonom regional mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah yaitu lokasi. Pernyataan tersebut sangat masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung untuk meminimumkan biaya-biaya dengan cara memilih lokasi yang memaksimalkan peluangnya untuk mendekati pasar. Model pengembangan industri kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah lokasi dengan biaya termurah, antara bahan baku dan pasar. Tentu saja banyak variabel lainnya yang mempengaruhi kualitas ketersediaan suatu lokasi, misalnya upah tenaga kerja, biaya energi (listrik), ketersediaan *suppliers*, komunikasi, fasilitas-fasilitas

Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor.....Ikrar Mallarangang

pendidikan dan pelatihan (diklat), kualitas pemerintah daerah dan tanggung jawabnya, dan sanitasi. Perusahaan-perusahaan yang berbeda membutuhkan kombinasi-kombinasi yang berbeda pula atas faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, seringkali masyarakat berusaha untuk memanipulasi biaya dari faktor-faktor tersebut untuk menarik perusahaan-perusahaan. Pada masa sekarang, keterbatasan atas relevansi dari teori ini adalah bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu dalam kegiatan produksi dan distribusi barang.

6. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral memandang bahwa ada hierarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang bersangkutan (Arsyad, 2010:377). Teori tempat sentral ini dapat diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

7. Teori Kausasi Kumulatif

Teori ini dikemukakan oleh Gunnar Myrdal (1957), yang dengan gamblang menjelaskan tentang sebab-sebab dari bertambah buruknya perbedaan dalam tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara. Myrdal berkeyakinan bahwa dalam proses pembangunan terdapat faktor-faktor yang akan memperburuk perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah. Keadaan tersebut muncul sebagai akibat dari berlangsungnya proses kausasi kumulatif. Menurut Myrdal (Arsyad, 2010:377), pembangunan di daerah-daerah yang lebih maju akan menyebabkan suatu keadaan yang menimbulkan hambatan yang lebih besar pada daerah-daerah yang lebih terbelakang untuk dapat maju dan berkembang. Suatu keadaan yang menghambat pembangunan ini digolongkannya sebagai *backwash effects*. Di sisi lain, perkembangan di daerah-daerah yang lebih maju ternyata juga dapat menimbulkan suatu keadaan yang akan mendorong perkembangan bagi daerah-daerah yang lebih miskin (*spread effects*).

8. Model Daya Tarik

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif (Arsyad, 2010:378).

Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi. Perekonomian suatu negara dianggap berhasil atau tidak dalam program pembangunan dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan suatu negara atau daerah. Pengejaran pertumbuhan merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua

negara di dunia dewasa ini (Todaro, 2000: 136).

Meier dan Baldwin dalam Pujoalwanto (2014:87) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Definisi ini menekankan tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) Proses, (2) Output perkapita, dan (3) Jangka Panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu

saat. Pertumbuhan ekonomi harus memberikan kontribusi pada pendapatan perkapita, dan pertumbuhan ekonomi menyangkut jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi yang mapan tidak bisa diukur dalam jangka waktu yang pendek.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu ($PDRB_t$) dengan PDRB tahun sebelumnya ($PDRB_{t-1}$).

$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \quad (1)$

Ahli-ahli ekonomi telah lama memandang beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2009:423), antara lain:

1. Tanah dan kekayaan alam

lainnya.

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang dapat diperoleh,

- jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat.
2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi.
 3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi Barang-barang modal penting dalam meningkatkan keefisienan pertumbuhan ekonomi. Pada masa kini pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat yang tinggi, yaitu jauh lebih modern daripada kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat yang masih belum berkembang. Apabila barang-barang modal saja bertambah sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang akan dicapai adalah jauh lebih rendah daripada yang dicapai pada masa kini. Beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi, dan oleh karenanya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih pesat. Efek yang utama adalah:
 - a. Kemajuan teknologi dapat mempertinggi keefisienan kegiatan memproduksi sesuatu barang. Kemajuan seperti itu akan menurunkan biaya produksi dan meningkatkan jumlah produksi.
 - b. Kemajuan teknologi menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya. Kemajuan seperti itu menambah barang dan jasa yang dapat digunakan masyarakat.
 - c. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan mutu barang-barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harga.
 4. Sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial dan sikap masyarakat penting peranannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Di dalam menganalisis masalah-masalah pembangunan di negara-negara berkembang, ahli-ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius kepada pembangunan. Adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan produktivitas yang tinggi. Menurut Jhingan (2012:67) proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor

Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor.....Ikrar Mallarangang

ekonomi dan non-ekonomi. Beberapa faktor ekonomi dan non-ekonomi tersebut yaitu:

1. Faktor Ekonomi

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi perekonomian.

Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting karena jika suatu negara

kekurangan sumber daya alam tidak akan dapat membangun dengan cepat. Namun, tersedianya sumber daya alam secara melimpah saja belum cukup bagi pertumbuhan ekonomi. Diperlukan pemanfaatan yang tepat dan sumber daya alam tersebut perlu dikembangkan.

b. Akumulasi Modal

Akumulasi modal atau pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional.

c. Organisasi

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi yang bersifat melengkapi modal, tenaga kerja, dan membantu meningkatkan produktivitasnya. Organisasi yang dimaksud adalah

perusahaan swasta, pemerintah, bank, dan lembaga-lembaga internasional yang ikut terlibat dalam memajukan perekonomian negara maju dan negara sedang berkembang.

d. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi yang berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi karena telah meningkatkan produktivitas tenaga kerja, modal dan faktor produksi lainnya.

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Pembagian kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien daripada sebelumnya. Jika skala produksi luas, spesialisasi, dan pembagian kerja akan meluas pula. Alhasil, jika produksi naik, laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat pesat.

2. Faktor Non-Ekonomi

a. Faktor Sosial

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ke kuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, stuktur dan nilai-nilai sosial. Perubahan hanya mungkin terjadi melalui penyebaran pendidikan dan ilmu pengetahuan.

- b. Faktor Manusia
Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Penggunaan sumber daya manusia secara tepat untuk pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan cara, yaitu harus ada pengendalian atas perkembangan penduduk dan adanya perubahan dalam pandangan tenaga buruh. Perubahan semacam ini tergantung pada penyebaran pendidikan. Hanya tenaga buruh yang terlatih dan terdidik dengan efisiensi tinggi yang akan membawa masyarakat kepada pembangunan ekonomi yang pesat.
- c. Faktor Politik dan Administratif
Struktur politik dan administratif yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Administrasi yang kuat, efisien dan tidak korup dengan

demikian amat penting bagi pembangunan ekonomi. Begitu juga dengan pemerintahan yang baik dengan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, serta penyediaan fasilitas modal *overhead* yang tepat pada waktunya akan menunjang pembentukan modal.

Ketimpangan Pembangunan Ketimpangan

pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah satu dengan daerah lain merupakan suatu hal yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah. (Williamson, 1965, dalam Hartono, 2008). Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Dalam ketimpangan, ada Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah secara absolut maupun ketimpangan relatif antara potensi dan tingkat kesejahteraan tersebut dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antar daerah. Falsafah pembangunan ekonomi yang dianut pemerintah jelas tidak bermaksud membatasi arus modal (bahkan yang terbang ke luar negeri saja hampir tidak dibatasi). Arus modal mempunyai logika sendiri untuk berakumulasi di lokasi-lokasi

Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor.....Ikrar Mallarangang

yang mempunyai prospek *return* atau tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan tingkat risiko yang lebih rendah. Sehingga tidak dapat dihindari jika arus modal lebih terkonsentrasi di daerah-daerah kaya sumber daya alam dan kota-kota besar yang prasarana dan sarananya lebih lengkap yang mengakibatkan jumlah penduduk yang menganggur di Provinsi yang berkembang akan meningkat (Hartono, 2008).

Pendapatan per kapita rata-rata suatu daerah dapat disederhanakan menjadi Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan mendasarkan kepada pendapatan personal yang didekati dengan pendekatan konsumsi (Widiarto, 2001). Dalam pengukuran ketimpangan pembangunan ekonomi regional digunakan Indeks Williamson. Berikut beberapa definisi ketimpangan menurut teori para ahli:

1. Menurut Andrinof A. Chaniago
Ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek social
2. Menurut Budi Winarno
Ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk

memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat.

3. Menurut Jonathan Haughton & Shahidur R. Khandker
Ketimpangan sosial adalah bentuk-bentuk ketidak-adilan yang terjadi dalam proses pembangunan.
4. Roichatul Aswidah
Ketimpangan sosial sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi.

Faktor – Faktor Penyebab Ketimpangan

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan berbagai faktor yang terdapat pada masing-masing daerah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan suatu daerah juga menjadi berbeda.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan atau memicu terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah tersebut (Sjafrizal, 2008), adalah:

1. Faktor geografis
Suatu wilayah atau daerah yang sangat luas akan terjadi variasi pada keadaan fisik alam berupa topografi, iklim, curah hujan, sumberdaya mineral dan variasi spasial lainnya.
2. Faktor historis

Perkembangan masyarakat dalam suatu wilayah tergantung dari kegiatan atau budaya hidup yang telah dilakukan di masa lalu. Bentuk kelembagaan, budaya atau kehidupan perekonomian pada masa lalu merupakan penyebab yang cukup penting terutama yang terkait dengan sistem intensif terhadap kapasitas kerja.

3. Faktor politis

Tidak stabilnya suhu politik sangat mempengaruhi perkembangan dan pembangunan di suatu wilayah. Instabilitas politik akan menyebabkan orang ragu untuk berusaha atau melakukan investasi sehingga kegiatan ekonomi suatu wilayah tidak akan berkembang.

4. Faktor kebijakan

Terjadinya kesenjangan antar wilayah bisa diakibatkan oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang sentralistik di beberapa sektor dan lebih menekankan pertumbuhan dan pembangunan pada daerah-daerah yang menjadi pusat-pusat pembangunan di wilayah tertentu menyebabkan kesenjangan yang luar biasa antar daerah.

5. Faktor administratif

Kesenjangan wilayah dapat terjadi karena adanya perbedaan kemampuan pengelola

administrasi. Wilayah yang dikelola dengan administrasi yang baik cenderung lebih maju. Sehingga dapat dikatakan wilayah yang ingin maju harus mempunyai administrator yang jujur, terpelajar, terlatih yang berarti sama dengan mempunyai sumberdaya manusia yang lebih baik.

6. Faktor sosial

Masyarakat dengan kepercayaan-kepercayaan yang primitif, kepercayaan tradisional dan nilai-nilai sosial yang rendah cenderung akan menghambat perkembangan ekonomi.

7. Faktor ekonomi

Beberapa faktor ekonomi yang menyebabkan kesenjangan antar wilayah adalah perbedaan kuantitas dan kualitas dari faktor produksi yang dimiliki seperti lahan, infrastruktur, tenaga kerja, modal, organisasi dan perusahaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya akumulasi dari berbagai faktor ekonomi.

Ukuran Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah yang mula – mula dilakukan adalah Williamson Index yang digunakan dalam studi Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966. Istilah Williamson Index muncul sebagai penghargaan kepada pengguna awal indeks

Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor.....Ikrar Mallarangang

tersebut dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitive terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Berbeda dengan Gini Rasio yang lazim digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, Williamson Index menggunakan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Dengan demikian formulasi Indeks Williamson ini secara statistic dapat ditampilkan dengan formula sebagai berikut.

Subskrip w digunakan karena formulasi yang dipakai adalah secara tertimbang (weighted) agar indeks tersebut menjadi lebih stabil dan dapat dibandingkan dengan Negara atau daerah lainnya. Sedangkan pengertian indeks ini adalah sebagai berikut: bila V_w mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila V_w mendekati nol berarti sangat merata.

Indeks lainnya juga lazim digunakan adalah dalam mengukur ketimpangan antar wilayah adalah Theil Index sebagaimana digunakan oleh Akita dan Alisyahbana (2002) dalam studinya yang dilakukan di Indonesia. Data yang diperluakn untuk mengukur indeks ini adalah sama dengan yang diperlukan untuk menghitung Williamson Index yaitu PDRB per kapita dan jumlah penduduk untuk setiap wilayah. Formulasi Theil Index (T_d) tersebut adalah sebagai berikut :

$T_d = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \{y_{ij} / Y\} \log [\{y_{ij} / Y\} / \{n_{ij} / N\}] \tag{5.2}$ <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> y_{ij} = PDRB per kapita sektor i di provinsi Sulsel Y = PDRB per kapita sector i Indonesia N = Jumlah tenaga kerja sektor i di provinsi Sulsel N = Jumlah tenaga kerja sector i Indonesia

Penggunaan Theil Index sebagai ukuran ketimpangan ekonomi antar wilayah mempunyai kelebihan tertentu. Pertama, indeks ini dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antar daerah

secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas. Kedua, dengan menggunakan indeks ini dapat pula dihitung kontribusi (dalam persentase) masing – masing daerah terhadap

ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting.

Hasil perhitungan indeks sebagai dependent variable (factor yang diterangkan) dan eberapa variable tertentu sebagai independent variable (factor yang menerangkan). Mengikuti hipotesis neo – klasi, variable yang dapat digunakan sebagai independent variable adalah pendapatan per kapita yang menunjukkan tingkat pembangunan suatu Negara. Persamaan yang digunakan adalah dalam bentuk

$$\log V_w = \log \phi + \delta \log Y_c + 2 \log Y_c + \varepsilon$$

Dimana ε adalah faktor kesalahan (disturbance terms). Keuntungan penggunaan persamaan bersifat kuadratik adalah dapat diketahui apakah ketimpangan pada Negara bersangkutan masih berada pada kondisi meningkat (divergence) atau sudah berada pada kondisi yang menurun (convergence).

Konsentrasi kegiatan ekonomi daerah dapat diukur dengan menggunakan indeks Location Quotient (LQ) atau Industrial Concentration Index (ICI). Indeks LQ dan ICI ini dapat dihitung dengan menggunakan data nilai tambah masing-masing kegiatan ekonomi sebagaimana terdapat

kuadratik karena hubungan antara ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan tingkat pembangunan suatu Negara adalah bersifat Non Linear. Fungsi regresi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

$$V_w = \phi Y_c^\delta Y_c^2$$

Dimana V_w adalah Indeks Williamson, Y_c PDRB per kapita, sedangkan ϕ dan δ adalah koefisien regresi. Persamaan ini dapat diestimasi melalui persamaan logaritma berganda berikut ini :

dalam PDRB masing-masing daerah atau dengan menggunakan data jumlah pekerja (employment) untuk masing-masing sektor.

Mobilitas barang (perdagangan) antar daerah jelas akan memengaruhi pula ketimpangan pembanguna antar wilayah, karena sebagaimana telah ditunjukkan oleh Teori Heckser – Ohlin dalam Ilmu Ekonomi Internasional bahwa bila kegiatan perdagangan internasional dan antar wilayah kurang lancar maka proses penyamanan harga faktor produksi (factor production equalization) akan terganggu. Akibatnya pemerataan proses pembangunan akan terhambat dan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung menjadi tinggi,.

Sedangkan alokasi investasi antar wilayah jelas akan memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah, karena investasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan proses pembangunan daerah. Persamaan yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor penentu ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah sebagai berikut:

$$V_w = \theta Y^\beta (LQ)^\sigma M^\delta I^\eta$$

Persamaan ini akan dapat dihitung dengan metode regresi setelah dilakukan transformasi dengan menggunakan logaritma sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\log V_w = \log \theta + \beta \log Y_c + \sigma \log (LQ) + \delta \log M + \eta \log I + \varepsilon \quad (5.6)$$

dimana V_w adalah Williamson Index, LQ adalah Location Quotient, M adalah tingkat migrasi (dalam persentase), I adalah alokasi investasi (dalam persentase) dan θ , β , σ , δ , dan η adalah koefisien regresi dan ε adalah faktor kesalahan (disturbance term).

Cara lain yang dapat pula dilakukan adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya ketimpangan tersebut adalah dengan menggunakan analisis Shift – share seperti

juga yang telah dilakukan oleh Akita dan Alisyahbana (2002). Menggunakan cara ini akan dapat diketahui apakah penyebab ketimpangan tersebut berasal dari luar daerah (regional – share) atau dari dalam daerah sendiri (proportionality shift dan differential shift). Dengan demikian, akan dapat pula diketahui faktor – faktor yang menentukan ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan menggunakan ketiga unsure Shift – share tersebut.

RANCANGAN PENELITIAN

Metode Penelitian

Penggunaan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Daerah dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan objek penelitian adalah ketimpangan pembangunan tahun 2011 sampai dengan 2015.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan, dan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan. Data sekunder ini meliputi: Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sulsel tahun 2011 –2015, Sulawesi Selatan Dalam Angka tahun 2011 – 2015, Statistik Indonesia tahun 2011 – 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulsel, dan Data sekunder lainnya yang terkait dengan tujuan penelitian ini.

digali berbagai data, informasi dan referensi dari berbagai sumber pustaka, media massa dan internet.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik untuk memperoleh data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis, baik berupa angka maupun keterangan. Selain data-data laporan tertulis, untuk kepentingan penelitian ini juga

Instrumen Analisis Data

Untuk mencapai tujuan serta menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka digunakan tiga macam metode analisis data, yaitu:

1. Analisis Indeks Williamson

Untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang perkembangan sektor daerah dari segi pemerataan pembangunan dapat diamati dengan menggunakan Indeks Williamson yang merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur ketimpangan daerah ataupun sektoral. Perhitungan Indeks Williamson digunakan rumus sebagai berikut (Safrizal, 1997) :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 (f_i : n)}}{\bar{y}}, \quad 0 < V_w < 1$$

Dimana :

Vw = IndeksWilliamson

Yi = PDRBperkapita sectori di Sulsel

Y = PDRBperkapita sectorl di Indonesia

Fi = Jumlah tenaga kerja sector I di Sulsel

N = Jumlah tenaga kerja sector I di Indonesia

Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau 0 < Vw

< 1. Jika Indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan

ekonomi dan jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Analisis Shift Share

Menurut Tarigan (2007) untuk melihat struktur ekonomi secara lebih tajam digunakan analisis Shift share. Analisis *Shift Share* digunakan untuk menganalisis pola perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode Shift Share adalah satu tehnik analisis dalam ilmu Ekonomi regional yang bertujuan mengetahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi dan menentukan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Dalam hal ini faktor

yang mempengaruhi tersebut dapat berasal dari luar daerah maupun daerah itu sendiri, factor luar daerah dapat berasal dari perkembangan kegiatan ekonomi nasional maupun internasional yang dapat mempengaruhi karena terdapat hubungan ekonomi yang cukup erat dengan perekonomian nasional maupun internasional. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam daerah biasanya timbul dari struktur perekonomian daerah serta potensi khusus yang dimiliki daerah bersangkutan (Sjafrizal, 2008 dan 2012). Secara matematis, komponen *Proportional Shift* (P) dan *Differential Shift* (D) dapat diformulasikan sebagai berikut (Tarigan 2004:80-82):

Gr	: Y _{r,t} – Y _{r,t-n}
	: (N _r + P _r + D _r)
N _r	: Y _{r,i,t-n} (Y _t / Y _{t-n}) - Y _{r,i,t-n}
P _r	: ∑ [(Y _{i,t} / Y _{i,t-n}) – (Y _t / Y _{t-n})] Y _{r,i,t-n}
D _r	: ∑ [(Y _{r,i,t} – (Y _{i,t} / Y _{i,t-n}) Y _{r,i,t-n}

Dimana:

ΔY : *Pertumbuhan PDRB Total sulse*

P_s : *Komponen Share di sulse*

P : *Proportional Shift sulse*

D : *Differential Shift sulse*

Y : *PDRB Total sulse*

Y_i : *PDB Total Indonesia*

T : *Tahun*

t-n : *Tahun Awal*

i : *Sektor pada PDRB*

Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor.....Ikrar Mallarangang

r : Region atau wilayah analisis

3. Indeks Theil

Indeks Theil lazimnya digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah sebagaimana yang digunakan oleh Akita dan Alisyahbana (2002) dalam studinya yang dilakukan di Indonesia. Sedangkan data yang dibutuhkan untuk menghitung indeks ini sama dengan yang dibutuhkan untuk menghitung indeks

Williamson yaitu PDRB perkapita dan jumlah penduduk, namun untuk menghitung antar sector menggunakan data PDRB perkapita dan tenaga kerja suatu sector. Demikian pula halnya bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata. Formulasi Theil Indeks adalah sebagai berikut:

$$T_d = \sum_{j=1}^n \{y_{ij}/Y\} \log [\{y_{ij}/Y\}/\{n_{ij}/N\}]$$

Dimana:

Y_{ij} : PDRB perkapita sector i di provinsi j

Y : PDB perkapita sector i seluruh provinsi j

n : Jumlah tenaga kerja sector i di provinsi j

N : Jumlah tenaga kerja seluruh sector i

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Untuk mengetahui pertumbuhan dan pergeseran sektor dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan digunakan analisis Shift Share. Analisis Shift Share mengasumsikan bahwa pertumbuhan PDRB suatu daerah ditentukan oleh

komponen Share (Provincial Share/PS), dan komponen Shift (Proportional Shift (P) dan differential Shift (D). Hasil analisis Shift Share Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2015 dengan menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 ditunjukkan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 4
Analisis Shift Share Provinsi Sulawesi Selatan
pada tahun 2011- 2015 (Miliaran Rupiah)

Sektor	PS	P	D	ΔE
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.199,0	-1.507,7	3.940,5	11.631,7
Pertambangan dan Penggalian	2.585,6	-2.469,9	3.854,8	3.970,5
Industri	5.593,5	-389,9	4.565,8	9.769,4
Pengadaan Listrik dan Gas	34,6	3,2	17,3	55,1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	58,8	-1,6	-24,9	32,3
Konstruksi	4.657,5	1.556,2	2.324,1	8.537,7
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.470,3	-679,0	5.006,5	9.797,8
Transportasi dan Pergudangan	1.522,6	665,3	-4,6	2.183,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	539,8	98,8	242,7	881,4
Informasi dan Komunikasi	2.175,1	2.847,5	681,9	5.704,5
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.313,6	823,0	481,8	2.618,4
Real Estate	1.431,6	277,2	883,5	2.592,3
Jasa Perusahaan	176,3	124,7	-52,8	248,2
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.123,2	-919,0	408,6	1.612,6
Jasa Pendidikan	2.237,0	1.042,4	-194,1	3.085,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	729,6	483,0	320,9	1.488,4
Jasa Lainnya	513,4	254,0	78,5	845,8
Total	40.361,5	2.162,8	22.530,5	65.054,8

Sumber: Data diolah, 2016

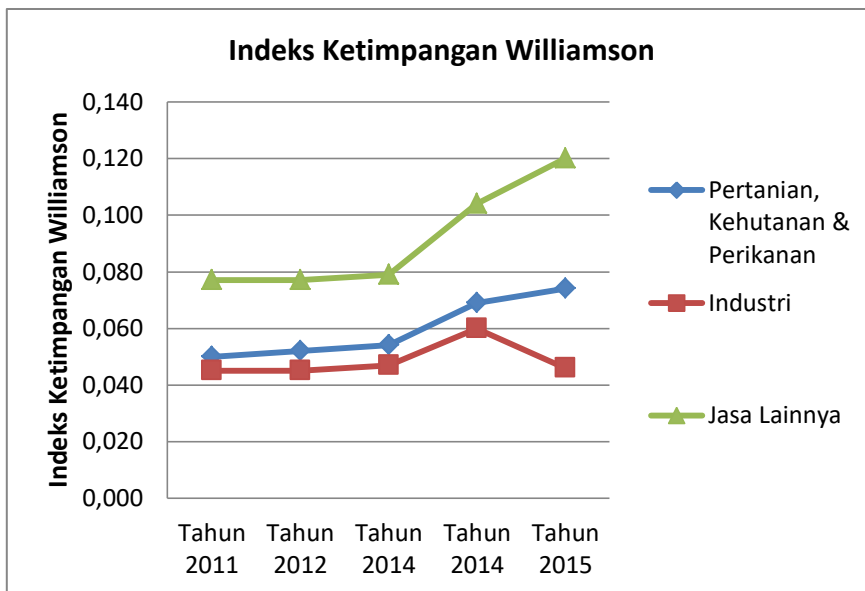
Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor.....Ikrar Mallarangang

Tabel. 8
Perhitungan Indeks Williamson

Tahun	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Industri	Jasa Lainnya	Keterangan
2011	0,050	0,045	0,077	Timpang
2012	0,052	0,045	0,077	Timpang
2013	0,054	0,047	0,079	Timpang
2014	0,069	0,060	0,104	Timpang
2015	0,074	0,046	0,120	Timpang

Sumber: Diolah dari data BPS 2011-2015

Gambar 2. Indeks Ketimpangan Williamson



Dari hasil analisis Indeks Williamson sebagai alat analisis yang digunakan untuk menentukan ketimpangan pembangunan wilayah maupun sector ekonomi dapat disimpulkan bahwa dari hasil

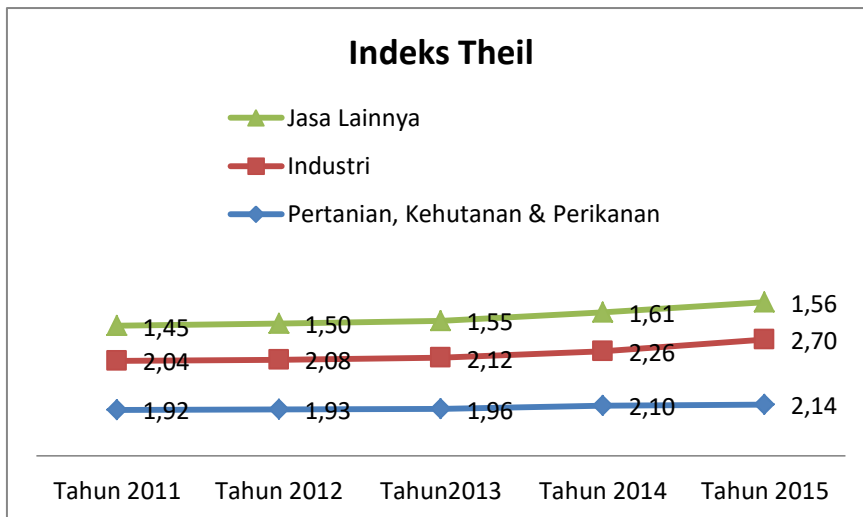
keseluruhan yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi berada di atas nol ini menunjukkan telah terjadi ketimpangan.

Tabel 9
Perhitungan Indeks Theil

Tahun	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Industri	Jasa Lainnya	Keterangan
2011	1,92	2,04	1,45	Sangat Timpang
2012	1,93	2,08	1,50	Sangat Timpang
2013	1,96	2,12	1,55	Sangat Timpang
2014	2,10	2,26	1,61	Sangat Timpang
2015	2,14	2,70	1,56	Sangat Timpang

Sumber : Diolah dari data BPS 2011 – 2015

Gambar 3. Indeks Theil



Dari hasil analisis Indeks Theil sebagai alat analisis yang digunakan untuk menentukan ketimpangan pembangunan wilayah maupun sector ekonomi dapat disimpulkan bahwa dari hasil keseluruhan yang ditunjukkan oleh Indeks Theil menunjukkan bahwa telah terjadi

ketimpangan yang sangat tinggi karena nilai Indeks ini menunjukkan melebar jauh dari Satu.

Pembahasan

Adapun pembahasan dari hasil analisis Shift Share, Indeks Williamson dan Indeks

Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor.....Ikrar Mallarangang

Theil yang telah dilakukan sebelumnya:

1. Ketimpangan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2011 - 2015

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mempunyai peranan yang cukup besar dalam perkembangan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan, hasil perhitungan analisis Shift Share menunjukkan bahwa Pengaruh pertumbuhan PDB Nasional (PS) menyebabkan kinerja sektor pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Sulawesi Selatan lebih tinggi. Nilai komponen bauran industry (P) sector Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebesar -1.507,7 miliar rupiah menunjukkan bahwa sector ini di Indonesia memiliki laju pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan total PDB Nasional, sehingga memberikan kontribusi negative terhadap pertumbuhan sector yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai daya saing atau keunggulan kompetitif (D) sector Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3.940,5 miliar Rupiah yang berarti sector tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan disektor yang sama di Indonesia

Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson

menunjukkan bahwa untuk Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan mengalami ketimpangan meskipun ketimpangan tersebut belum terlalu melebar jauh dari nol namun dari tahun 2011 nilai untuk sector ini 0,050 meningkat pada tahun 2012 menjadi 0,052, pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,054, pada tahun 2014 meningkat 0,069, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 0,074 hal ini membuktikan bahwa ketimpangan yang terjadi pada sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terus meningkat.

Pada Tabel 9 diatas nilai Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terlihat sangat timpang karena melebar sangat jauh dari angka Satu dimana pada tahun 2011 nilai Indeks Theil 1,92, pada tahun 2012 meningkat menjadi 1,93, pada tahun 2013 meningkat menjadi 1,96, pada tahun 2014 meningkat menjadi 2,10 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 2,14

2. Ketimpangan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2011 - 2015

Hasil perhitungan Analisis Shift share sector Industri menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan PDB Nasional (PS) menyebabkan peningkatan kinerja disektor Industri di Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai komponen bauran industry -389,9 miliar rupiah

Analisis Potensi Sumberdaya perikanan.....Erwin, Leonardus Tumuka

menunjukkan bahwa sector ini memiliki laju pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan Total PDB Nasional sehingga memberikan kontribusi negative terhadap pertumbuhan sector yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai daya saing atau keunggulan kompetitif (D) sector Industri di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4.565,8 miliar rupiah yang berarti bahwa sector tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sector yang sama di Indonesia.

Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan bahwa untuk Sektor Industri mengalami ketimpangan, pada tahun 2011 nilai untuk sector ini 0,045, pada tahun 2012 tetap pada nilai 0,045, pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,047, pada tahun 2014 meningkat 0,060, dan pada tahun 2015 turun menjadi 0,046 hal ini membuktikan bahwa sector tersebut mengalami ketimpangan meskipun belum melebar jauh dari angka nol, namun ketimpangan yang terjadi pada sector Industri terus meningkat namun pada tahun 2015 nilai ketimpangan dari tahun 2014 menurun yang menandakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meningkatkan kinerja pembangunan pada sector Industri.

Untuk sector Industri terlihat sangat timpang karena melebar sangat jauh dari angka Satu dimana pada tahun 2011 nilai Indeks Theil 2,04, pada tahun 2012 meningkat menjadi 2,08, pada tahun 2013 meningkat menjadi 2,12, pada tahun 2014 meningkat menjadi 2,26 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 2,70

3. Bagaimana Ketimpangan Sektor Jasa Lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 - 2015

Hasil perhitungan analisis *Shift Share* sector Jasa Lainnya menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan PDB Nasional (PS) menyebabkan peningkatan kinerja sector Jasa Lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai komponen bauran industri (P) sector Jasa Lainnya sebesar 254,0 milliar rupiah menunjukkan bahwa sector ini di Indonesia memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan total PDB Indonesia, sehingga memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan sector yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai daya saing atau keunggulan kompetitif (D) sector Jasa Lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 78,5 milliar rupiah yang berarti bahwa sector tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sector yang sama di Indonesia.

Analisis Potensi Sumberdaya perikanan.....Erwin, Leonardus Tumuka

Berdasarkan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan bahwa untuk Jasa Lainnya mengalami ketimpangan yang terus meningkat dari tahun 2011 – 2015 meskipun ketimpangan tersebut belum terlalu melebar jauh dari nol namun dari tahun 2011 nilai untuk sector ini 0,077, tetap pada tahun 2012 menjadi 0,077, pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,079, pada tahun 2014 meningkat 0,104, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 0,120 hal ini membuktikan bahwa ketimpangan yang terjadi pada sector Jasa Lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan terus meningkat.

Untuk sector Jasa Lainnya terlihat sangat timpang karena melebar sangat jauh dari angka Satu dimana pada tahun 2011 nilai Indeks Theil 1,45, pada tahun 2012 meningkat menjadi 1,50, pada tahun 2013 meningkat menjadi 1,55, pada tahun 2014 meningkat menjadi 1,61 dan pada tahun 2015 menurun menjadi 1,56

Dari hasil analisis Indeks Theil menunjukkan bahwa telah terjadi ketimpangan yang sangat tinggi untuk ketiga sector tersebut diatas, dimana ukurannya bila nilai indeks mendekati 1 (satu) artinya sangat timpang dan sebaliknya bila mendekati 0 (nol) berarti sangat merata.

Dari hasil analisis Indeks Williamson dan Indeks Theil sebagai alat analisis yang digunakan untuk menentukan ketimpangan pembangunan wilayah maupun sector ekonomi dapat disimpulkan bahwa dari hasil keseluruhan yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson dan Indeks Theil menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi berada di atas nol ini menunjukkan telah terjadi ketimpangan dan besarnya nilai Indeks Theil yang berada di atas angka satu menunjukkan tingginya ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis Indeks Williamson dapat disimpulkan bahwa dari hasil keseluruhan yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang terjadi berada di atas nol menunjukkan ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2011-2015 mengalami peningkatan
2. Dari hasil analisis Indeks Theil menunjukkan telah terjadi ketimpangan yang

sangat tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai Indeks Theil selama periode 2011 - 2015 menunjukkan ketimpangan untuk Sektor Industri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan Jasa Lainnya, dan hal ini harus segera diatasi oleh pemerintah.

SARAN

Mengacu pada hasil penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengakselerasi pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan Sektor di Provinsi Sulawesi Selatan perlu diarahkan kepada pengembangan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Industri dan Jasa Lainnya dengan tidak mengesampingkan pengembangan sektor-sektor lain sebagai pendukung.
2. Meningkatkan investasi swasta dengan memberikan kemudahan. Investasi juga diarahkan pada daerah-daerah yang kurang maju dengan membangun sarana dan prasarana yang

3. Diperlukan upaya terencana dan berkesinambungan untuk mengurangi ketimpangan yang disertai dengan pemerataan (growth with equity)
4. Dengan hasil penelitian ini diharapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat mendeteksi jika ada kesalahan dalam pengambilan kebijakan untuk mewujudkan distribusi perekonomian yang lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu. Yogyakarta 2008.
- Ekonomi Archipelago. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2005.
- Akita, T dan A. Alisjahbana. 2002. Regional Income Inequality in Indonesia and the Initial Impact of the Economic Crisis. Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol 38. No.2. 201-222.
- Arsyad, L. Ekonomi Pembangunan, Edisi 5. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. 2005.
- Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta. 2010.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2015. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2015. Sulsel Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Produk Domestik Bruto (PDB) 2015. Statistik Indonesia.
- Hartono, Budiantoro, 2008, Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Tesis S.2 Program Pasca Sarjana. Undip Semarang.
- Irawan dan Suparmoko. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. BPFE. Yogyakarta.
- Jhingan M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PTRaja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kuncoro, M. 2003. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Munir, B. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Edisi Pertama*. Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram.
- Nikijuluw, J. B. 2013. Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. *Jurnal Ekonomi Cita Ekonomika Volume VII (2)*, hal. 196 – 203.
- Pujoalwanto, B. 2014. *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rachbini, Didik J. 2001. *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Rahmat. 2013. *Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Samuelson, P. A. dan Nordhaus, W. D. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. PT. Media Global Edukasi. Jakarta.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Penerbit Baduose Media: Sumatra Barat.
- Sukirno, Sadono. 2009. *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tambunan. 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia Teori dan Penemuan Empiris*. Salemba Empat, Jakarta.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Edisi Revisi*. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Todaro, M. P dan Smith, S. C.
2006. Pembangunan
Ekonomi. Erlangga. Jakarta.

Todaro, M. P. 2000.
Pembangunan Ekonomi Di
Dunia Ketiga, Edisi Ketujuh.
Penerbit Airlangga, Jakarta.